



**Evaluasi Efektivitas Belanja Modal Pembangunan Sumur Bor Pada  
Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
*Evaluation the Effectiveness of Capital Expenditure for Well Construction  
at The PUPR Department of East Nusa Tenggara Province*

**Angelia Febrianti Mooy<sup>1)</sup>, M. E. Perseveranda<sup>2)</sup>, Susana Purnamasari Baso<sup>\*3)</sup>,**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
Jalan Jend Jl. A. Yani No.50-52, Merdeka Lama, Kupang, 85211

**E-Mail:** [purnamabaso@gmail.com](mailto:purnamabaso@gmail.com)

**Aksioma: Jurnal  
Manajemen**

Vol. 4

No. 1

Halaman 103-108,

Bulan Februari, Tahun 2025

E-ISSN 2828-0997

**Abstract**

*This study focuses on the low infrastructure index and Human Development Index (HDI) in East Nusa Tenggara (NTT), indicating an urgent need for access to clean water. The objective of the research is to evaluate the effectiveness of capital expenditure by the Public Works and Housing Office (PUPR) of NTT Province in the development of borewell infrastructure. Data were collected through interviews and official documents, including budget realization reports and project package lists. The results indicate that the budget allocation for borewell construction is significant and close to the budget ceiling, reflecting the local government's commitment. The financial effectiveness of capital expenditure is very good, with most projects rated as "very successful." However, the physical achievement of the construction has only reached 90.43%, leaving a gap of 9.57% from the target. Factors affecting effectiveness include delays in implementation and geographical conditions. The study concludes that the management of capital expenditure is effective, but attention is needed to achieve optimal physical targets.*

**Keywords:** *Capital Expenditure; Effectiveness; Borewells; Public Works and Housing Office; East Nusa Tenggara.*

**Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada rendahnya indeks infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menunjukkan kebutuhan mendesak akan akses air bersih. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT dalam pembangunan infrastruktur sumur bor. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen resmi terkait, termasuk laporan realisasi anggaran dan daftar paket proyek. Hasil menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk sumur bor signifikan dan mendekati pagu anggaran, mencerminkan komitmen pemerintah daerah. Efektivitas

belanja modal secara finansial sangat baik, dengan sebagian besar proyek dinyatakan "sangat berhasil". Namun, capaian fisik pembangunan baru mencapai 90,43%, menyisakan selisih 9,57% dari target. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas meliputi keterlambatan pelaksanaan dan kondisi geografis. Penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran belanja modal efektif, tetapi perlu perhatian untuk mencapai target fisik yang optimal.

**Kata Kunci:** Belanja Modal; Efektivitas; Sumur Bor; Dinas PUPR; Nusa Tenggara Timur

## PENDAHULUAN

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas (Warsono & Nurhayati, 2022). Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dapat meningkatkan output dalam perekonomian dan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung (Awinah et al., 2024). Namun, di banyak daerah, efektivitas belanja modal untuk infrastruktur masih menjadi isu krusial. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi tantangan signifikan terkait ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya akses air bersih. Kondisi geografis NTT yang cenderung kering dan berbatu, dengan dominasi bebatuan yang menyulitkan akses terhadap sumber daya air, menjadikan pembangunan sumur bor sebagai investasi vital. Meskipun demikian, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTT dibandingkan rata-rata nasional (68,40 berbanding 71,9 pada tahun 2023) mengindikasikan adanya keterbatasan infrastruktur yang berkontribusi pada rendahnya kualitas hidup masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2024).

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) menyatakan belanja modal adalah suatu kegiatan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya menambah aset atau kekayaan daerah dan melebihi satu tahun anggaran dan selanjutnya akan menambah belanja bersifat terus menerus yang mana meliputi kelompok biaya administrasi umum pada biaya pemeliharaan. Belanja modal, sebagai pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk menambah aset dan memberikan manfaat jangka panjang, seharusnya menjadi instrumen efektif dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur (Alfayed et al., 2025). Dalam konteks NTT, alokasi belanja modal untuk pembangunan sumur bor oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menunjukkan realisasi finansial yang sangat tinggi, mencapai 99,86% pada tahun 2023 dan 99,79% pada tahun 2024 dari pagu anggaran. Angka ini secara finansial menunjukkan efisiensi yang luar biasa (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Namun, paradoks muncul ketika capaian fisik pembangunan sumur bor baru mencapai 90,43% dari target Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR Provinsi NTT hingga tahun 2024, menyisakan selisih 9,57%. Disparitas antara efektivitas finansial dan capaian fisik ini mengindikasikan adanya faktor-faktor non-finansial yang menghambat optimalisasi belanja modal (Kanwil DJPb Provinsi NTT, 2024).

Kesenjangan antara efektivitas finansial dan capaian fisik ini juga tercermin dalam berbagai penelitian terdahulu. Ratuludji et al., (2023) secara spesifik menyoroti bahwa belanja infrastruktur di NTT menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada akses listrik, air bersih, dan jalan raya, mengindikasikan pembangunan yang tidak merata dan belum optimal dalam meningkatkan kualitas hidup. Secara kolektif, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun belanja modal secara finansial seringkali terlihat efisien, capaian fisik dan dampak riil terhadap kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan. Terdapat kesenjangan antara alokasi anggaran yang tinggi dan realisasi fisik yang belum mencapai target, serta dampak yang belum optimal terhadap IPM di NTT. Belum ada penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi efektivitas belanja modal pembangunan

sumur bor di NTT dengan menganalisis faktor-faktor penghambat dari sisi non-finansial, meskipun isu air bersih sangat mendesak di wilayah tersebut.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena akan mengisi kekosongan pengetahuan mengenai faktor-faktor spesifik yang menyebabkan disparitas antara efektivitas finansial dan capaian fisik belanja modal pembangunan sumur bor di NTT. Dengan menganalisis kendala-kendala seperti keterlambatan pelaksanaan, kondisi geografis dan geologis yang menantang, permasalahan sosial, kondisi cuaca, keterbatasan fiskal daerah, dan pergeseran titik lokasi sumur bor, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Pemahaman ini krusial untuk merumuskan strategi yang lebih tepat dan adaptif dalam pengelolaan belanja modal, sehingga investasi publik benar-benar dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan berkontribusi pada peningkatan IPM serta ketahanan pangan di NTT.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas belanja modal pembangunan sumur bor pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut, dan menganalisis manfaat pembangunan infrastruktur sumur bor bagi Masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas belanja modal pembangunan sumur bor pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya dari perspektif para pemangku kepentingan. Metode ini dapat memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara rinci, menganalisis data yang terkumpul, dan menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap informasi yang diperoleh. Pendekatan ini relevan untuk menggali kompleksitas isu-isu seperti keterlambatan pelaksanaan, kondisi geografis, permasalahan sosial, dan keterbatasan fiskal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Naikolan - Kupang. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, terhitung sejak November 2024 hingga Mei 2025

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah informan adalah 2 orang. Informan yang dipilih adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belanja modal pembangunan sumur bor di Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan informan dengan kriteria di atas bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan mendalam dari berbagai tingkatan dan fungsi yang terlibat dalam pengelolaan belanja modal pembangunan sumur bor.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi NTT yaitu individu yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran dan dokumentasi berupa laporan Realisasi Spp Spm Paket Murni Dan Luncuran Kegiatan Bidang Pembangunan SDA dan Irigasi Dinas PUPR Provinsi NTT, Daftar Paket Sumur Bor Bidang Pembangunan SDA Dan Irigasi Dinas PUPR Provinsi NTT & Daftar Paket Bidang Pembangunan SDA Dan Irigasi Dinas PUPR Provinsi NTT & Daftar Paket Sumur Bor- Paket Luncuran 2023 Bidang Pembangunan SDA Dan Irigai Dinas PUPR Provinsi NTT dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas PUPR.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Belanja Modal Pembangunan Sumur Bor**

Pembangunan infrastruktur sumur bor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan prioritas strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) periode

2019-2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air baku guna memperkuat ketahanan pangan di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan iklim signifikan. Pendanaan proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2023 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024.

## 2. Efektivitas Belanja Modal Pembangunan Sumur Bor pada Dinas PUPR

Efektivitas belanja modal dievaluasi berdasarkan rasio realisasi anggaran terhadap pagu anggaran, serta kriteria keberhasilan yang ditetapkan oleh Dinas PUPR. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara finansial, belanja modal untuk pembangunan sumur bor sangat efektif. Pada tahun 2023, seluruh proyek pembangunan sumur bor di berbagai kabupaten (Kupang, Belu, Sumba Barat Daya, Alor, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Flores Timur) menunjukkan efektivitas finansial di atas 99%, dengan sebagian besar mencapai 99,9% ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa dana yang dialokasikan hampir seluruhnya terserap sesuai rencana. Pada tahun 2024, pola serupa terlihat pada tahun 2024, di mana proyek-proyek di Kabupaten Lembata, Manggarai Timur, Ngada, Sabu Raijua, Kota Kupang, Belu, Kupang, Manggarai Barat, Nagekeo, Alor, Sumba Timur, dan TTS juga mencapai efektivitas finansial di atas 99%. Beberapa lokasi bahkan mencapai 99,99% efektivitas.

Tingginya rasio efektivitas finansial (mendekati 100%) menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran oleh Dinas PUPR sangat baik dalam hal penyerapan dana. Ini sejalan dengan teori efektivitas yang menyatakan bahwa pencapaian output dapat dievaluasi dengan membandingkan anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan (Munir, 2004). Dalam konteks ini, realisasi anggaran yang hampir sama dengan pagu menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana publik.

Meskipun efektivitas finansial sangat tinggi, capaian fisik pembangunan sumur bor baru mencapai 90,43% dari target. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyerapan anggaran dan hasil fisik yang dicapai. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun dana telah dibelanjakan secara efisien, implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal untuk mencapai target kuantitas yang ditetapkan.

## 3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Efektivitas Belanja Modal

Analisis mendalam mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas belanja modal, khususnya dalam konteks capaian fisik:

1. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan: Keterlambatan dalam memulai pekerjaan di lapangan, terutama karena belum tersedianya Surat Ketersediaan Dana (SKD) dari Badan Keuangan Daerah, menyebabkan waktu pelaksanaan menjadi sempit. Hal ini menghambat penyelesaian proyek tepat waktu dan berdampak pada capaian fisik. Ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan anggaran sudah matang (seperti yang diindikasikan oleh tingginya realisasi finansial), aspek koordinasi dan birokrasi dalam pencairan dana masih menjadi kendala.
2. Kondisi Geografis dan Geologis: Karakteristik batuan vulkanik yang sangat keras di beberapa lokasi pembangunan sumur bor di Pulau Flores, berbeda dengan Pulau Timor, menyulitkan proses pengeboran. Kondisi ini memerlukan waktu dan peralatan yang lebih spesifik, yang dapat memperlambat progres fisik proyek. Faktor ini menyoroti pentingnya analisis lokasi yang lebih mendalam sebelum penetapan target fisik.
3. Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas Lokasi: Penolakan masyarakat terkait lokasi sumur bor yang jauh dari akses utama, serta perbedaan persepsi dalam penempatan titik sumur, jaringan pipa, dan kran air, menyebabkan keterlambatan. Hal ini mengharuskan peninjauan ulang lokasi dan penyesuaian rencana, yang berdampak pada waktu dan biaya pelaksanaan. Aspek partisipasi masyarakat dan sosialisasi yang lebih intensif dapat memitigasi masalah ini.
4. Kondisi Cuaca yang Tidak Mendukung: Curah hujan yang tinggi di beberapa lokasi mengganggu proses pekerjaan di lapangan, menyebabkan proyek tertunda dan membutuhkan penyesuaian jadwal. Ini adalah faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan manajemen risiko proyek.

5. Keterbatasan Fiskal Daerah: Meskipun anggaran dialokasikan secara signifikan, keterbatasan keuangan daerah secara keseluruhan masih menjadi kendala dalam mendukung seluruh rencana kegiatan yang telah disusun. Hal ini menyebabkan beberapa rencana lokasi tidak dapat direalisasikan sepenuhnya, yang berkontribusi pada selisih capaian fisik.
6. Pergeseran Titik Lokasi Sumur Bor: Hasil survei di lapangan menunjukkan bahwa beberapa titik yang direncanakan tidak memiliki sumber air yang cukup atau sumber air telah berkurang. Pergeseran lokasi yang diperlukan berimplikasi pada revisi teknis dan penyesuaian dokumen pelaksanaan, yang dapat menunda proyek.

Faktor-faktor ini menguatkan teori efektivitas James L. Gibson yang menekankan pentingnya perencanaan yang matang, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan dan pengendalian. Meskipun Dinas PUPR telah menunjukkan kejelasan tujuan dan strategi, serta proses analisis kebijakan yang solid, tantangan dalam perencanaan yang matang (terkait SKD) dan ketersediaan sarana/prasarana (terkait kondisi geologis dan sosial) masih perlu dioptimalkan.

## KESIMPULAN

Secara finansial, pengelolaan belanja modal untuk pembangunan sumur bor oleh Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat efektif, dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi. Namun, capaian fisik proyek masih belum mencapai target optimal, menyisakan selisih yang perlu ditangani. Faktor-faktor seperti keterlambatan administrasi, kondisi geografis, permasalahan sosial, cuaca, keterbatasan fiskal, dan pergeseran titik lokasi menjadi penyebab utama kesenjangan ini. Meskipun demikian, pembangunan sumur bor telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, yang merupakan kontribusi vital terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Untuk mencapai efektivitas yang lebih komprehensif, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan di lapangan, serta peningkatan koordinasi antarpihak terkait.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami efektivitas belanja modal dalam konteks pembangunan infrastruktur di daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan proyek, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan proyek serupa di masa depan.

Penelitian ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi aspek yang belum tercover secara mendalam, seperti memahami persepsi masyarakat terhadap pembangunan sumur bor dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang efektivitas belanja modal, tetapi juga membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya literatur dan praktik dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfayed, M. F., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar, S. (2025). Pengaruh Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1083>
- Awainah, N., Sulfiana, Nurhaedah, Jamaluddin, & Aminullah, A. (2024). Peran Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 6847–6854.
- Badan Pusat Statistik. (2024, December 2). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024*. <https://Timortengahutarakab.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2024/12/02/317/Indeks->

- Pembangunan-Manusia--Ipm--Provinsi-Nusa-Tenggara-Timur-Tahun-2024-Mencapai-69-14--Meningkat-0-74-Poin--1-08-Persen--Dibandingkan-Tahun-Sebelumnya--68-40-.Html. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *LAPORAN BULANAN Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Kanwil DJPb Provinsi NTT. (2024). *KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2024*.
- Ratuludji, S. P., Perseveranda, M. E., & Man, S. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Pada 22 Kabupaten/Kota di NTT). *Edunomika*, 08(01), 1–11.
- Warsono, S., & Nurhayati, I. (2022). Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sebagai Indikator Penguat Daya Saing Daerah. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 3(2), 87–107. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>